

ANALISIS TINGKAT UPAH PEKERJA KEBERSIHAN DI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK

Toti Indrawati

Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru - Pekanbaru

ABSTRAKSI

Penelitian ini menganalisis tingkat upah pekerja kebersihan di Kecamatan Siak. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder dari Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Siak, Dinas Tenaga Kerja dan data primer yang diperoleh dari para pekerja kebersihan. Dari data 70 orang pekerja kebersihan diperoleh rata-rata upah pekerja sebesar Rp.882.142/bulan. Jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten Siak maka upah telah memenuhi (diatas) Standar Upah Minimum Kabupaten Siak yaitu sebesar Rp.838.000/bulan. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Siak Sebesar Rp.1.211.000/bulan, jika dibandingkan dengan upah rata-rata pekerja tersebut dengan banyaknya tanggungan keluarga maka masih dibawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, para pekerja dan anggota keluarga mengerjakan pekerjaan sampingan, dimana pendapatan rata-rata keluarga sebesar Rp.1.551.428/bulan, sedangkan pengeluaran keluarga pekerja kebersihan sebesar Rp.1.569.428/bulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerja kebersihan di Kecamatan Siak belum dapat memenuhi pengeluaran konsumsi keluarganya dan tergolong berpendapatan rendah.

Kata Kunci : Upah Minimum Regional (UMR), Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Pendapatan Keluarga.

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan, dua asset pokok yang harus dimiliki yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dari asset ini, sumber daya manusia lebih penting dari sumber daya alam karena bagaimanapun melimpahnya sumber daya alam, tanpa adanya kemampuan sumber daya manusia untuk mengelolanya, maka akan sia-sia saja.

Untuk membangun suatu perekonomian, kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga kerja harus menjadi pusat perhatian karena merupakan subjek dan objek dari pembangunan. Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber daya alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja adalah manusia yang mampu menghasilkan barang atau jasa dan memiliki nilai ekonomis yang dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2005 : 29).

Semakin tinggi pertumbuhan penduduk pada suatu tempat (daerah) akan menimbulkan tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas masyarakat. Dalam pemenuhan tersebut perlu sekali menjaga dan melestarikan lingkungan. Lingkungan itu tidak terlepas dari kebersihan, ketertiban dan keindahan dari lingkungan hidup manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, berbagai usaha dan upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah kebersihan dan keindahan daerah (kota). Dalam rangka meningkatkan kebersihan dan keindahan diharapkan tidak hanya pada usaha pemerintah saja tetapi harus ada partisipasi dari pekerja kebersihan dan warga setempat.

Kabupaten Siak merupakan Kabupaten yang baru terbentuk tentu banyak permasalahan yang harus dibenahi yang salah satunya adalah dalam penataan kota untuk melakukan hal tersebut perlu dilakukan pelestarian lingkungan agar tata ruang kota dan kebersihan kota dapat terjaga sehingga aktifitas-aktifitas yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk mewujudkan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten yang bersih, indah, aman dan nyaman menuju Siak sehat 2008, maka pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Kebersihan dan Pasar menyediakan sarana dan prasarana kebersihan. Dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana tersebut memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru sebagai petugas kebersihan dan dapat pula menjadi salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Hal ini memberi peluang menampung tenaga kerja. Menurut Mulyadi (2003 : 59) tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 – 64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan jika mereka berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Jumlah tenaga kerja yang dapat ditampung sebagai pekerja kebersihan di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Jumlah Pekerja Kebersihan di Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Siak Tahun 2008

No.	Kecamatan	Jumlah Pekerja (orang)	Persentase
1	Siak	235	46,63
2	Tualang	72	14,28
3	Minas	44	8,73
4	Sei. Apit	31	6,15
5	Lubuk Dalam	25	4,96
6	Dayun	18	3,58
7	Kandis	30	5,95
8	Bunga Raya	28	5,5
9	Koto Gasib	-	0
10	Kerinci Kanan	-	0
11	Sei. Mandau	13	2,58

12	Mempura	-	0
13	Sabak Auh	8	1,58
		504 orang	100,00

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Siak Tahun 2008

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah pekerja yang dapat ditampung sebanyak 504 orang. Jumlah pekerja yang terbanyak berada di Kecamatan Siak sebanyak 235 orang (46,63%), maka penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Siak, Kecamatan Tualang mempunyai pekerja sebanyak 72 orang (14,28%), sementara untuk kecamatan Koto Gasib, Kerinci Kanan dan Mempura belum memiliki petugas kebersihan.

Upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan atas dasar suatu perjanjian kerja (Sumarsono, 2003 : 141).

Upah merupakan sumber bagi pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya dan besarnya tingkat upah adalah merupakan salah satu yang terpenting dalam menentukan tingkat kesejahteraan pekerja. Tingkat upah diupayakan untuk selalu naik dari waktu ke waktu, sehingga secara langsung akan mempengaruhi peningkatan produktivitas pekerja. Adanya penetapan Upah Minimum Regional (UMR) selama ini diharapkan sebagai instrumen kebijaksanaan yang sesuai untuk mencari keserasian dalam hubungan kerja.

Tingkat upah yang diterima oleh pekerja tersebut akan mempengaruhi pola pengeluaran konsumsi. Pengeluaran total konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat penting (kebutuhan primer) yaitu makanan, pakaian, perumahan maupun kebutuhan lainnya yang bersifat skunder.

Sebagaimana diketahui bahwa upah merupakan sumber utama penghasilan seseorang melalui pekerjaannya, oleh sebab itu diharapkan upah tersebut dapat terpenuhi untuk kebutuhan pekerja sehingga pedoman untuk melihat kewajaran atau kelayakan upah dikaitkan dengan kebutuhan hidup dengan jumlah tanggungan keluarga yaitu dengan melihat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setiap bulannya. Menurut Raharja (2002 : 51) pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin tinggi pendapatan, konsumsi semakin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar atau pola hidup menjadi semakin konsumtif, setidaknya semakin menuntut kualitas yang baik.

Jadi ada 2 tolak ukur untuk melihat kecukupan pendapatan atau upah yang diterima pekerja yaitu melihat Tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dihitung dari kebutuhan hidup tiap bulannya dan Standar Upah Minimum Regional (UMR) untuk Kabupaten Siak bisa dilihat pada Upah Minimum Kabupaten Siak yang sudah ditetapkan

Dalam penelitian ini masala yang akan dirumuskan yaitu apakah upah yang diterima pekerja kebersihan di Kecamatan Siak telah memenuhi Standar Upah Minimum Kabupaten Siak dan sudah memenuhi Standar Kebutuhan Hidup Layak. Selain itu apakah total pendapatan yang diterima rumah tangga pekerja kebersihan sudah memenuhi pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah hubungan upah yang diterima pekerja kebersihan sudah dapat memenuhi Standar Upah Minimum Kabupaten Siak dan Kebutuhan

Hidup Layak (KHL), juga dapat mengetahui apakah total pendapatan yang diterima rumah tangga pekerja kebersihan sudah dapat memenuhi pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Dugaan sementara dari hasil penelitian ini adalah upah yang diterima oleh pekerja kebersihan telah memenuhi Standar Upah Minimum Kabupaten Siak dan belum memenuhi Standar Kebutuhan Hidup Layak. Sedangkan total pendapatan yang diterima oleh rumah tangga pekerja kebersihan belum bisa memenuhi pengeluaran konsumsi rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Siak Kabupaten Siak karena Kecamatan Siak mempunyai pekerja kebersihan di Dinas Kebersihan dan Pasar yang paling banyak dan merupakan pusat pemerintah.

Populasi pada penelitian ini adalah pekerja kebersihan di Dinas Kebersihan dan Pasar di Kecamatan Siak dengan jumlah pekerja sebanyak 235 orang.

Untuk menentukan sampel digunakan rumus Slovin Umar (2002 : 77) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2} = \frac{235}{1 + 235 (0.1)^2} = \frac{235}{3,35} = 70,149 = 70 \text{ orang}$$

N = Ukuran Populasi

n = Ukuran Sampel

e = 10%

jadi besarnya sampel diambil sebanyak 70 orang. Teknik pengambilan sampel adalah acak stratifikasi yaitu mengambil sampel pada masing-masing kelompok populasi yang sebanding dengan ukuran populasi pada masing-masing kelompok tersebut (Boediono dan Wayan Koster, 2002: 369) dengan rumus :

$$n_i = \frac{N_i}{N} \cdot n$$

Tabel 2 : Jumlah Populasi dan Sampel Pekerja Kebersihan di Kecamatan Siak Tahun 2008

No	Tugas / Jabatan	Populasi	Sampel
1	Koodinator Kebersihan jalan, taman, operator mesin rumput dan parit	2	1
2	Pengawas jaln, taman, pasar, pengawas operasional mesin, pengawas mobil operasional, pengawas TPA, pengawas parit	12	4
3	Supir dan anggota supir mobil operasional kebersihan kota siak	38	11
4	Operator mesin rumput	15	4
5	Petugas parit / selokan	32	10
6	Petugas jalan	86	26
7	Petugas taman	24	7
8	Pembantu mesin incinerator	5	1
9	Petugas kebersihan TPS dan TPA	8	2

10	Petugas kebersihan pasar ikan dan pasar trans	9	3
11	Anggota pengawas pasar ikan dan pasar trans	4	1
	Jumlah	235	70

Sumber : Kantor Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Siak

Jenis data yang diperlukan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pekerja kebersihan yaitu jumlah pendapatan (pendapatan pokok, pendapatan sampingan, pendapatan keluarga), umur, pendidikan, jumlah tanggungan dan jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebersihan dan Pasar dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif adalah penganalisaan data dengan menggambarkan seluruh peristiwa dari objek penelitian dan mengaitkannya dengan teori yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Pekerja kebersihan yang bekerja di Kecamatan Siak berumur antara 20 – 63 tahun. Struktur umur pekerja paling banyak berkisar 30 – 39 tahun yaitu 27 orang (38,57%) dan 40 – 49 tahun 21 orang (30%) yaitu berada pada usia produktif sedangkan yang berusia diatas 60 tahun hanya 3 orang (4,28%).

Tabel 3 : Responden Berdasarkan Tingkat Umur Pekerja Kebersihan di Kecamatan Siak Tahun 2008

Kelompok Umur	Jumlah Responden	Persentase (%)
20-29	8	11,42
30-39	27	38,57
40-49	21	30
50-59	11	15,71
60+	3	4,28
Jumlah	70	100,00

Sumber : Data Olahan, Tahun 2008

Tingkat pendidikan pekerja kebersihan yang berada di Kecamatan Siak yang terbanyak hanya tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 29 orang (41,41%), yang tamat SLTP 25 orang (35,71%), tidak bersekolah 12 orang (17,14%) dan yang hanya tmat SLTA 4 orang (5,71%). Maka dapat dikatakan tingkat pendidikan pekerja umum masih rendah.

Tabel 4 : Tingkat Pendidikan Pekerja Kebersihan di Kecamatan Siak Tahun 2008

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tidak Sekolah	12	17,14
SD	29	41,42
SLTP	25	35,71
SLTA	4	5,71
Jumlah	70	100,00

Sumber : Data Olahan, Tahun 2008

Jumlah tanggungan responden adalah jumlah tanggungan pekerja dalam keluarga. Dari hasil penelitian jumlah tanggungan pekerja kebersihan paling banyak setiap pekerja menanggung 1 – 3 orang (45,72%), yang memiliki tanggungan 4 – 6 orang sebanyak 24 pekerja (34,28%) dan yang jumlah tanggungan 7 – 9 orang hanya 14 pekerja (20%).

Tabel 5 : Jumlah Tanggungan Pekerja Kebersihan di Kecamatan Siak Tahun 2008

Jumlah tanggungan	Jumlah	Persentase (%)
1-3	32	45,71
4-6	24	34,28
7-9	14	20,00
Jumlah	70	100

Sumber : Data Olahan, Tahun 2008

Upah dan Pendapatan

Sistem pengupahan yang diterapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pasar yaitu sistem bulanan. Upah yang diterima pekerja tidak selalu tiap bulan diberikan. Upah yang diterima baru diberikan setelah 2 atau tiga bulan.

Menurut Sukirno (2006 : 350) pengertian upah terdiri dari upah uang dan upah riil. Upah uang adalah sejumlah uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah riil adalah upah pekerja diukur dari kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa yang diperlukan. Besarnya upah yang diterima pekerja kebersihan Kecamatan Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6 : Besarnya Upah yang Diterima Pekerja Kebersihan di Kecamatan Siak Tahun 2008

Upah (Rp/Bulan)	Jumlah	Persentase
850.000	61	87,14
1.000.000	4	5,71
1.100.000	4	5,71
1.500.000	1	1,42
Jumlah	70	100

Sumber : Data olahan, tahun 2008

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerja yang menerima upah sebesar Rp. 850.000/bulan berjumlah 61 orang (87,14%), yang menerima Rp. 1.000.000/bulan berjumlah 4 orang (5,71%), yang menerima Rp.1.100.000/bulan berjumlah 4 orang (5,71%) dan yang menerima Rp. 1.500.000/bulan hanya 1 orang (1,42). Dengan demikian besar upah yang diterima pekerja kebersihan tiap bulan mulai dari Rp. 850.000 samapi dengan Rp. 1.500.000

Standar Upah Minimum Kabupaten Siak tahun 2008 sesuai dengan peraturan Gubernur Riau Nomor 3 tahun 2008 sebesar Rp. 838.000 (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak 2008). Untuk melihat perbandingan antara upah pekerja kebersihan dengan Upah Minimum Kabupaten Siak di peroleh rata-rata upah pekerja kebersihan di Kecamatan Siak sebesar Rp. 882.142/bulan atau upah yang terendah diterima pekerja sebesar Rp. 850.000/bulan. Dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa upah pekerja kebersihan telah sesuai (didas) Standar Upah Minimum Kabupaten Siak tahun 2008 sebesar Rp. 838.000/bulan.

Standar Kebutuhan Hidup Layak yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak bulan Desember 2008 adalah sebesar Rp. 1.211.000 (Dinas Tenaga Kerja 2008).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh mengenai perbandingan rata-rata upah yang diterima pekerja kebersihan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 : Perbandingan Jumlah Pekerja Kebersihan yang Menerima Upah Kecil dari KHL dan Besar KHL di Kecamatan Siak Tahun 2008

No	Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	<KHL	69	98,57
2	>KHL	1	1,43
Jumlah		70	100

Sumber : Data olahan tahun 2008

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pekerja yang menerima upah dibawah Standar Kebutuhan Hidup Layak atau lebih kecil dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah 69 orang atau sebesar 98,57%, sedangkan sisanya 1 orang pekerja kebersihan yang menerima upah diatas Standar Kebutuhan Hidup Layak atau sebesar 1,43%. Dengan demikian upah yang diterima oleh pekerja kebersihan hampir semuanya kecil dari Kebutuhan Hidup Layak. Jadi dapat disimpulkan bahwa upah yang diterima responden belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan jika dilihat dari jumlah tanggungan yang responden hampir semuanya kecil dari nilai KHL.

Total pendapatan rumah tangga adalah merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh pekerja kebersihan baik pendapatan pokok maupun pendapatan sampingan ditambah pendapatan yang diterima oleh anggota rumah tangga. Dari 70 responden pekerja kebersihan 42 dari responden mempunyai pekerjaan sampingan. Sebagai petani 8 orang, jasa ojek/becak 13 orang, buruh 16 orang dan tukang 5 orang. Selain pekerja kebersihan mempunyai pekerjaan sampingan, anggota keluarga responden juga mempunyai pekerjaan. Besarnya pendapatan total keluarga pekerja kebersihan dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8 : Besarnya Pendapatan Total Rumah Tangga Pekerja Kebersihan di Kecamatan Siak Tahun 2008

Pendapatan Total	Jumlah (Orang)	Persentase
850.000 – 1.599.999	42	60,00
1.600.000 – 2.149.999	15	21,43
2.150.000 – 2.749.999	8	11,43
2.750.000 – 3.349.999	2	2,85
3.350.000 – 3.949.999	3	4,28
Jumlah	70	100

Sumber : Data Olahan Tahun 2008

Pengeluaran Rumah Tangga (Konsumsi) Pekerja Kebersihan

Pengeluaran rumah tangga adalah jumlah seluruh pengeluaran (konsumsi) yang dikeluarkan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana jenis pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran pangan dan non pangan.

Menurut Sisjiatmoko (1999 : 209), besarnya konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh banyaknya anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga tersebut dapat menggambarkan banyak penduduk yang dianggap mempunyai aktifitas konsumtif yang harus ditanggung oleh anggota keluarga yang bekerja. Untuk mengetahui besarnya total pengeluaran konsumsi rumah tangga pekerja kebersihan perbulan dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9 : Total Pengeluaran Konsumsi Pekerja Kebersihan Kecamatan Siak Per Bulan Tahun 2008

No.	Total Konsumsi (Rp/Bulan)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	800.000 – 1.599.999	43	61,43
2	1.600.000 – 2.399.999	16	22,86
3	2.400.000 – 3.199.999	8	11,43
4	3.200.000 – 3.999.999	3	4,28
Jumlah		70	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rumah tangga pekerja kebersihan yang total konsumsinya Rp. 800.000 – Rp. 1.599.999/bulan berjumlah 43 orang atau 61,43%, total konsumsi antara Rp. 1.600.000 – Rp. 2.399.999/bulan berjumlah 16 orang atau 22,86%, total konsumsi antara Rp. 2.400.000 – Rp. 3.199.999 berjumlah 8 orang atau 11,43%. Sedangkan untuk total konsumsi Rp. 3.200.000 – Rp. 3.999.999/bulan berjumlah 3 orang atau 4,28%.

Dari 70 pekerja kebersihan dapat kita lihat perbandingan rata-rata pendapatan keluarga rumah tangga pekerja kebersihan dengan rata-rata pengeluaran rumah tangga pekerja kebersihan sebagai berikut:

Tabel 10: Perbandingan Rata-Rata Pendapatan Keluarga Pekerja Kebersihan dengan Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Pekerja Kebersihan di Kecamatan Siak Tahun 2008

Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga (Rp/Bulan)	Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga (Rp/Bulan)	Tabungan Keluarga (Rp/Bulan)
1.551.428	1.569.428	- 18.000

Dari data diatas dapat dilihat rata-rata pendapatan pekerja kebersihan lebih kecil dari rata-rata pengeluaran rumah tangga. Sehingga terdapat dissaving sebesar Rp. 18.000. sehingga dapat disimpulkan pendapatan yang diperoleh rumah tangga pekerja kebersihan belum mampu memenuhi pengeluaran rumah tangga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan :

1. Upah yang diterima pekerja kebersihan di Kecamatan Siak lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten Siak tahun 2008 dan belum memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) jika dilihat dari jumlah tanggungan keluarga.
2. Pendapatan rumah tangga pekerja kebersihan belum mampu memenuhi pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Saran

Kepada pihak pemerintah melalui Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Siak agar dapat memberikan upah diatas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) karena pekerja kebersihan ini melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sampah dan kotoran dan dapat memberikan pelayanan kesehatan. Kepada instansi terkait hendaknya tepat waktu dalam memberikan upah setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2004, Laporan Perekonomian Riau, Pekanbaru
 Badan Pusat Statistik, 2004, Pendapatan Penduduk Keluarga Miskin Provinsi Riau, Pekanbaru
 Boediono dan Wayan Koster, 2002, Statistik dan Probabilitas, Remaja Rosda Karya, Bandung
 Dinas Tenaga Kerja, 2008, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2008, Siak
 Mulyadi, 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan, Raja Grafindo Persada, Jakarta
 Prathama Raharja, 2002. Teori Ekonomi Makro, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
 Samuelson dan Nordhaus, 2003. Ilmu Mikro Ekonomi, Media Global Edukasi, Jakarta
 Sisjiatmoko, 1992, Besarn Konsumsi Rumah Tangga, Bumi Aksara, Jakarta
 Sukirno Sadono, 2002, Pengantar Teori Makro Ekonmi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
 , 2006, Pengantar Ekonomi Mikro, Raja Grafindo, Jakarta
 Umar Hussein, 2002, Metode Riset Bisnis, Gramedia. Pusataka Utama, Jakarta

LAMPIRAN 1

Perbandingan Upah Pekerja Kebersihan Terhadap KHL dan UMR Kabupaten Siak Tahun 2008

No	Upah	Jumlah tanggungan	KHL	Ket	(UMR)	Ket
1	850.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
2	850.000	6	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
3	850.000	7	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
4	850.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
5	850.000	6	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
6	850.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
7	850.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
8	850.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
9	850.000	1	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
10	850.000	5	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR

11	850.000	2	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
12	850.000	6	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
13	850.000	2	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
14	1.000.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
15	850.000	8	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
16	850.000	5	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
17	850.000	1	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
18	1.000.000	4	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
19	850.000	6	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
20	850.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
21	850.000	4	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
22	850.000	2	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
23	1.100.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
24	850.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
25	850.000	7	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
26	850.000	2	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
27	850.000	7	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
28	850.000	5	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
29	1.000.000	7	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
30	850.000	2	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
31	850.000	6	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
32	850.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
33	850.000	8	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
34	850.000	6	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
35	850.000	5	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
36	850.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
37	850.000	8	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
38	850.000	2	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
39	850.000	4	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
40	1.100.000	4	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
41	850.000	5	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
42	850.000	2	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
43	850.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
44	850.000	6	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
45	850.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
46	850.000	6	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
47	850.000	6	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
48	1.000.000	7	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
49	850.000	1	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
50	850.000	7	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
51	850.000	6	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
52	850.000	1	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
53	850.000	5	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
54	1.100.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
55	850.000	7	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
56	850.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
57	850.000	5	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR

58	850.000	7	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
59	850.000	1	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
60	850.000	1	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
61	850.000	3	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
62	850.000	8	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
63	1.100.000	4	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
64	850.000	7	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
65	850.000	8	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
66	1.500.000	2	1.211.000	>KHL	838.000	> UMR
67	850.000	7	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
68	850.000	7	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
69	850.000	4	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
70	850.000	2	1.211.000	< KHL	838.000	> UMR
Σ	61.750.000	307				
Rata	882.142	4	1.211.000	< KHL		> UMR

LAMPIRAN : 2

Pendapatan Rata-Rata Responden (Upah Sebagai Pekerja Kebersihan, Pendapatan Kerja Sampingan, Pendapatan Anggota Keluarga) Pekerja Kebersihan di Kecamatan Siak Tahun 2008

No.	Upah Pekerja Kebersihan	Pendapatan sampingan Responden	Usaha sampingan anak dan istri	Jumlah tanggungan	Total Pendapatan
1	850.000	300.000		3	1.100.000
2	850.000	400.000	850.000	6	2.100.000
3	850.000	1.200.000	850.000	7	2.900.000
4	850.000	-		3	850.000
5	850.000	600.000		6	1.450.000
6	850.000	-		3	850.000
7	850.000	500.000		3	1.350.000
8	850.000	-	800.000	3	1.650.000
9	850.000	-		1	850.000
10	850.000	300.000		5	1.150.000
11	850.000	200.000		2	1.050.000
12	850.000	600.000		6	1.450.000
13	850.000	-		2	850.000
14	1.000.000	-	2.800.000	3	3.800.000
15	850.000	150.000	850.000	8	1.850.000
16	850.000	250.000		5	1.100.000
17	850.000	-		1	850.000
18	1.000.000	200.000		4	1.200.000
19	850.000	300.000	700.000	6	1.850.000
20	850.000	-		3	850.000
21	850.000	300.000		4	1.150.000

22	850.000	-		2	850.000
23	1.100.000	300.000		3	1.400.000
24	850.000	250.000		3	1.100.000
25	850.000	350.000	600.000	7	1.800.000
26	850.000	-		2	850.000
27	850.000	400.000		7	1.250.000
28	850.000	-	300.000	5	1.150.000
29	1.000.000	650.000		7	1.650.000
30	850.000	-		2	850.000
31	850.000	-	1.200.000	6	2.050.000
32	850.000	200.000		3	1.050.000
33	850.000	-	850.000	8	1.700.000
34	850.000	350.000		6	1.200.000
35	850.000	350.000	850.000	5	2.050.000
36	850.000	-		3	850.000
37	850.000	800.000	850.000	8	2.500.000
38	850.000	-		2	850.000
38	850.000	300.000		4	1.150.000
40	1.100.000	-		4	1.100.000
41	850.000	250.000		5	1.100.000
42	850.000	-		2	850.000
43	850.000	-	850.000	3	1.700.000
44	850.000	700.000		6	1.550.000
45	850.000	-	850.000	3	1.700.000
46	850.000	800.000	500.000	6	2.150.000
47	850.000	150.000	300.000	6	1.300.000
48	1.000.000	800.000	850.000	7	2.650.000
49	850.000	-	-	1	850.000
50	850.000	1.000.000	800.000	7	2.650.000
51	850.000	650.000	1.200.000	6	2.700.000
52	850.000	-	-	1	850.000
53	850.000	550.000	650.000	5	2.050.000
54	1.100.000	-	400.000	3	1.500.000
55	850.000	600.000	850.000	7	2.300.000
56	850.000	200.000	-	3	1.050.000
57	850.000	300.000	500.000	5	1.650.000
58	850.000	1.300.000	850.000	7	3.000.000
59	850.000	-	-	1	850.000
60	850.000	-	-	1	850.000
61	850.000	300.000	500.000	3	1.650.000
62	850.000	750.000	2.000.000	8	3.600.000
63	1.100.000	-	300.000	4	1.400.000
64	850.000	400.000	850.000	7	2.100.000
65	850.000	1.200.000	1.500.000	8	3.550.000
66	1.500.000	-	-	2	1.500.000
67	850.000	400.000	1.200.000	7	2.450.000
68	850.000	800.000	900.000	7	2.550.000

69	850.000	250.000	850.000	4	1.950.000
70	850.000	-	-	2	850.000
jmlh	61.750.000	20.650.000	28.200.000	308	110.600.000
Rata	882.142	491.667	402.875	4	1.580.000

LAMPIRAN : 3

Perhitungan Pendapatan Rata-Rata, Konsumsi Pangan Rata-Rata, Konsumsi Non Pangan Rata-Rata, Total Pengeluaran Konsumsi, Dan Tabungan Responden Pekerja Kebersihan di Kecamatan Siak /Bulan Tahun 2008

No.	Total Pendapatan Rumah tangga Responden	Konsumsi pangan (Rp)	Konsumsi Non pangan (Rp)	Total Pegeluaran (Rp)	Tabungan (Rp)
1	1.100.000	575.000	495.000	1.070.000	30.000
2	1.650.000	935.000	785.000	1.720.000	- 70.000
3	2.900.000	720.000	2.170.000	2.890.000	10.000
4	850.000	585.000	470.000	1.055.000	- 205.000
5	1.450.000	785.000	655.000	1.440.000	10.000
6	850.000	475.000	385.000	860.000	- 10.000
7	1.350.000	555.000	775.000	1.330.000	20.000
8	1.650.000	745.000	940.000	1.685.000	- 15.000
9	850.000	345.000	545.000	890.000	- 40.000
10	1.150.000	715.000	485.000	1.200.000	- 50.000
11	850.000	390.000	480.000	870.000	- 20.000
12	1.450.000	825.000	610.000	1.435.000	15.000
13	850.000	460.000	550.000	1.010.000	- 160.000
14	3.800.000	1.165.000	2.600.000	3.765.000	35.000
15	1.850.000	1.055.000	790.000	1.845.000	5.000
16	1.100.000	695.000	460.000	1.155.000	- 55.000
17	850.000	365.000	500.000	865.000	- 15.000
18	1.200.000	625.000	565.000	1.190.000	10.000
19	1.550.000	745.000	830.000	1.575.000	- 25.000
20	850.000	490.000	370.000	860.000	- 10.000
21	1.150.000	645.000	530.000	1.175.000	- 25.000
22	850.000	525.000	440.000	965.000	-115.000
23	1.100.000	575.000	515.000	1.090.000	10.000
24	1.100.000	470.000	525.000	995.000	105.000

25	1.450.000	765.000	670.000	1.435.000	15.000
26	850.000	445.000	425.000	870.000	- 20.000
27	1.250.000	740.000	515.000	1.255.000	- 5.000
28	1.150.000	585.000	555.000	1.140.000	10.000
29	1.650.000	845.000	815.000	1.660.000	- 10.000
30	850.000	420.000	415.000	835.000	15.000
31	2.050.000	850.000	1.215.000	2.065.000	- 15.000
32	1.050.000	550.000	475.000	1.025.000	25.000
33	1.700.000	1.000.000	900.000	1.900.000	- 200.000
34	1.200.000	725.000	575.000	1.300.000	- 100.000
35	1.700.000	785.000	900.000	1.685.000	15.000
36	850.000	440.000	430.000	870.000	- 20.000
37	2.500.000	1.265.000	1.200.000	2.465.000	35.000
38	850.000	490.000	410.000	900.000	- 50.000
39	1.150.000	615.000	550.000	1.165.000	- 15.000
40	1.100.000	560.000	530.000	1.090.000	10.000
41	1.100.000	635.000	455.000	1.090.000	10.000
42	850.000	485.000	405.000	890.000	- 40.000
43	1.700.000	760.000	935.000	1.695.000	5.000
44	1.550.000	790.000	750.000	1.540.000	10.000
45	1.700.000	780.000	910.000	1.690.000	10.000
46	2.150.000	900.000	1.350.000	2.250.000	- 100.000
47	1.300.000	770.000	560.000	1.330.000	- 30.000
48	2.650.000	1.100.000	1.500.000	2.600.000	50.000
49	850.000	475.000	400.000	875.000	- 25.000
50	2.650.000	750.000	1.950.000	2.700.000	- 50.000
51	2.700.000	750.000	1.900.000	2.650.000	50.000
52	850.000	425.000	500.000	925.000	- 75.000
53	2.050.000	900.000	1.300.000	2.200.000	- 150.000
54	1.500.000	525.000	950.000	1.475.000	25.000
55	2.300.000	965.000	1.300.000	2.265.000	35.000
56	1.050.000	650.000	500.000	1.150.000	- 100.000
57	1.650.000	700.000	900.000	1.600.000	50.000
58	3.000.000	1.300.000	1.750.000	3.050.000	-50.000
59	850.000	485.000	400.000	885.000	- 35.000
60	850.000	500.000	550.000	1.050.000	- 200.000
61	1.650.000	725.000	875.000	1.600.000	50.000
62	3.600.000	1.300.000	2.350.000	3.650.000	- 50.000
63	1.400.000	735.000	650.000	1.385.000	15.000
64	2.100.000	975.000	1.100.000	2.075.000	25.000
65	3.550.000	1.175.000	2.350.000	3.525.000	25.000
66	1.500.000	545.000	900.000	1.445.000	55.000
67	2.450.000	950.000	1.450.000	2.400.000	50.000
68	2.550.000	900.000	1.550.000	2.450.000	100.000
69	1.950.000	750.000	1.250.000	2.000.000	- 50.000
70	850.000	400.000	425.000	825.000	25.000
Jlh	108.600.000	49.645.000	60.215.000	109.860.000	

rata	1.551.428	709.214	860.214	1.569.428	
------	-----------	---------	---------	-----------	--

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PEDESAAN DI KABUPATEN BENGKALIS

Dahlan Tampubolon

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Riau Kampus Panam, Jalan HR Soebrantas Km 12,5 Pekanbaru
Email: dahlan.tampubolon@unri.ac.id

ABSTRAKSI

Artikel ini bertujuan mengidentifikasi ketersediaan modal usaha mikro kecil pedesaan, fungsi lembaga keuangan dan sistem pembiayaannya. Data dikumpulkan dari 114 responden usaha mikro kecil pedesaan di Kabupaten Bengkalis. Usaha mikro kecil pedesaan memiliki modal usaha yang tidak mencukupi. Sektor pekerjaan yang memiliki ketergantungan terhadap sumber permodalan adalah sektor industri. Sumber modal utama adalah pribadi, baik dari tabungan yang telah dimiliki atau dengan menjual aset yang ada. Fungsi utama lembaga keuangan mikro adalah sebagai penyedia modal usaha. Bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilihan model lembaganya. Pertimbangan utama dalam sistem pembiayaan adalah sanksi, beban bunga bagi pembiayaan, agunan dan biaya administrasi.

Kata kunci : Lembaga keuangan, usaha mikro kecil, BUMDes, dan modal.

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia sebagian besar bermukim di pedesaan umumnya memiliki akses yang terbatas. Untuk mendorong pembangunan daerah pedesaan diperlukan adanya lembaga-lembaga perkreditasi yang khusus menunjang pembangunan dengan memobilisasi dana yang ada di pedesaan dan menyalurkan pinjaman untuk membiayai pembangunan.

Seringkali suatu desa memiliki potensi sumberdaya alam yang kaya, namun kesejahteraan masyarakat dan ekonomi wilayah rendah, karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung produksi dan lemahnya permodalan di tingkat petani. Salah satu kendala utama dalam pengembangan ekonomi desa adalah terbatasnya lembaga keuangan di pedesaan, sehingga melambatkan geliat kegiatan ekonomi masyarakat dan desa. Implikasinya mengakibatkan adanya keterbatasan penyerapan tenaga kerja, kesempatan usaha maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan realitas wilayah pedesaan yang demikian maka perlu terobosan yang bersifat merangsang kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yaitu antara lain dengan pembangunan lembaga keuangan mikro di desa.

Kondisi keterbatasan kinerja peningkatan ekonomi desa dan masyarakat di pedesaan akibat keterbatasan sarana dan prasarana wilayah dan sumber-sumber pendanaan usaha, juga terjadi di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya skala usaha, produktivitas, dan rendahnya pendapatan petani dan nelayan karena terbatasnya sumber pendanaan untuk membiayai usaha masyarakat.

KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA

Sejarah Keuangan Mikro

Keuangan mikro di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19 dengan didirikannya Bank Kredit Rakyat dan Lumbung Desa. Kedua lembaga ini dibentuk untuk membantu melepaskan para petani, pegawai, dan buruh dan lintah darat. Pada 1905 Bank Kredit Rakyat ditingkatkan menjadi Bank Desa yang cakupan pelayanannya diperluas ke arah usaha di luar bidang pertanian (Bank Indonesia, 2). Pada 1929, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatblad 1929 No. 137 tentang pendirian Badan Kredit Desa (BKD) yang ditujukan untuk menangani kredit pedesaan di Jawa dan Bali. Pada 1930 dikeluarkan peraturan mengenai Algemene Volkskrediet Bank (AVB) yang merupakan cikal bakal Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Afdeelingsbank (AB) yang kemudian menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia mendorong pendirian bank pasar guna memberikan pelayanan jasa keuangan kepada pedagang pasar. Lembaga ini terdaftar sebagai perseroan terbatas (PT), *commanditaire vennootschap* (CV), koperasi, Maskapai Andil Indonesia (MAI), yayasan, atau perkumpulan. Pada 1970 pemerintah mencanangkan program kredit bimbingan massal/intensifikasi massal (Bimas/Inmas) yang melibatkan BRI melalui BRI Unit Desa sebagai penyalur kredit mini dan midi. Namun, karena terjadi kemacetan kredit bimas yang sangat besar, sejak 1984 penyaluran kredit mini (termasuk kredit mini dan midi) dihentikan. Kemudian, di BRI unit desa diciptakan skim kredit dan tabungan baru yang dinamakan kredit umum pedesaan (Kupedes) dan simpanan pedesaan (Simpedes) yang bersifat komersial. Kredit Bimas kemudian diganti dengan kredit usaha tani (KUT) yang kemudian berubah menjadi kredit ketahanan pangan (KKP).

Dengan dikeluarkannya Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pendirian bank baru di luar yang diatur dalam UU tersebut dilarang, meskipun yang telah ada tetap diperbolehkan berjalan. Pada masa itu telah ada beberapa lembaga keuangan mikro (LKM) yang dibentuk oleh pemerintah daerah, seperti Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali (Bank Indonesia, 2). Pada Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan peraturan yang memberikan kemudahan pendirian BPR. Langkah ini diikuti dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang menetapkan hanya ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan BPR. Dengan berlakunya UU tersebut, dengan sendirinya bank atau lembaga keuangan mikro yang tidak memenuhi syarat sebagai BPR dianggap sebagai bank gelap (*illegal banking*) atau biasa disebut sebagai lembaga nonformal. Akibatnya, sekitar 5.000 unit BKD yang ada saat ini statusnya menjadi tidak jelas, ada yang menganggapnya sebagai lembaga formal, dan ada pula yang menyebutnya sebagai lembaga semiformal.

Di samping itu, dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah melaksanakan berbagai program kredit mikro. Pelaksanaan program ini juga diikuti dengan pembentukan berbagai lembaga keuangan mikro seperti UPK (PPK), BKM (P2KP), LEP-M3 (subsidi BBM) dan sebagainya. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga mulai mengadopsi upaya serupa dalam program

pembangunannya. Sementara itu, beberapa LSM dan lembaga donor membentuk LKM dengan menggunakan berbagai pendekatan yang telah berhasil dikembangkan di berbagai negara, seperti model "Grameen Bank" atau "ASA" di Bangladesh. Refleksi pendekatan-pendekatan tersebut di Indonesia cukup berhasil, seperti yang dilakukan oleh Bina Swadaya, Yayasan Dharma Bhakti Parasahabat, Yayasan Mitra Usaha, Bina Masyarakat Mandiri dan sebagainya. Meskipun demikian, dan segi legalnya, lembaga-lembaga ml pada umumnya belum memiliki izin sebagai lembaga keuangan formal. Dalam upaya memperkuat posisi LKM, pada 2000 dibentuk Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro (GEMA PKM) Indonesia, yang merupakan forum komunikasi stakeholders yang terdiri dari lembaga keuangan, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, dunia bisnis, media massa, lembaga donor dan kelompok swadaya masyarakat. Forum ini berusaha mendorong dibuatnya peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga keuangan mikro, tetapi sampai sekarang belum berhasil.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa LKM yang secara legal diakui di Indonesia saat ini hanya BPR dan koperasi, di samping unit-unit keuangan mikro dari bank-bank umum seperti BRI unit desa dan unit layanan mikro (ULM) BNT. Lembaga keuangan formal lain yang juga memberikan layanan keuangan mikro adalah kantor pegadaian, yang keberadaannya diatur dengan UU tersendiri. Dengan demikian, lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam empat golongan besar, yaitu: 1) LKM formal, baik bank maupun nonbank, 2) LKM nonformal, baik yang berbadan hukum atau tidak, 3) LKM yang dibentuk melalui program pemerintah, dan 4) LKM informal, seperti arisan, rentenir, dan sebagainya.

Bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Pola-pola keuangan mikro di Indonesia terdiri dari (1) *Saving Ledd microfinance* yang berbasis anggota (*membership based*). Pada pola ini pendanaan atau pembiayaan yang beredar berasal dari pengusaha mikro sendiri. Contoh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), *Credit Union* (CU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP). (2) *Credit Ledd microfinance*, pada pola ini sumber keuangan bukan dari usaha mikro tetapi sumber lain seperti Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Grameen Bank, Asa Model (Bangladesh). (3) *Micro Banking*, pada pola ini bank difungsikan untuk pelayanan keuangan mikro seperti telah dilaksanakan BRI, BPR, Danamon Simpan Pinjam. Pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat (PHBK), integrasi antara bank dan kelompok swadaya masyarakat.

KEGIATAN PERBANKAN DI BENGKALIS

Sejalan dengan perkembangan perbankan dewasa ini, di Kabupaten Bengkalis secara umum kegiatan usaha serta peranan perbankan menunjukkan perkembangan yang cukup berarti antara lain tercermin dari peningkatan volume usaha, penghimpunan serta penyaluran dana masyarakat. Perkembangan tersebut selain meningkatkan perekonomian daerah juga tingkat kepercayaan masyarakat semakin bertambah, sehingga peluang perkembangan pertumbuhan perekonomian dan perbankan Bengkalis pada tahun-tahun yang akan datang diperkirakan lebih baik.

Seiring dengan peningkatan penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan Kabupaten Bengkalis, penyaluran kredit perbankan juga mengalami peningkatan tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 1.972.309 juta. Sebagian besar penyaluran kredit 2008 berdasarkan jenis penggunaan, digunakan modal kerja yaitu Rp 812.468 juta atau 44,65 persen mengalami penurunan 7,74 persen dibanding tahun 2008, sebaliknya kredit investasi sebesar Rp. 505.928 juta atau 24,71 persen.

Tabel 1 : Posisi Kredit Menurut Jenis Penggunaan Pada Perbankan di Bengkalis Tahun 1999 – 2008 (Juta Rupiah)

Tahun	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Jumlah
1999	112.761	370.530	50.346	533.637
2000	299.329	164.232	59.606	523.167
2001	647.021	243.390	90.630	981.041
2002	738.143	336.034	121.178	1.195.355
2003	565.027	364.024	131.346	1.060.396
2004	644.098	285.026	204.275	1.113.400
2005	659.024	363.079	293.399	1.315.501
2006	515.067	369.029	341.346	1.225.442
2007	1.691.573	434.974	424.462	2.551.009
2008	880.648	487.401	604.260	1.972.309

Sumber : Bank Indonesia Cabang Pekanbaru, 2009

Selanjutnya jika dilihat penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi 2008, maka kredit disalurkan terbesar pada sektor industri, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 2. : Komposisi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi di Bengkalis Tahun 2004-2008 (Juta Rupiah)

Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
Pertanian	447.081	343.330	256.833	298.198	340.524
Pertambangan	30.688	94	-	242.029	126.591
Perindustrian	163.797	344.477	246.301	1.175.074	398.901
Jasa-jasa	91.246	102.768	85.050	110.441	138.098
Konstruksi	23.350	27.780	39.520	65.006	61.238
Perdagangan, Hotel & Restoran	194.053	229.811	294.650	300.680	363.664
Angk & Komunikasi	15.148	14.767	11.979	9.572	5.204
Jasa Dunia Usaha	50.113	53.718	30.267	32.433	66.601
Jasa Sosial Masyarakat	2.635	6.503	3.284	3.430	5.055
Jasa Sosial Masyarakat	206.535	295.022	342.608	424.588	604.531
Lain-lain					
Jumlah	1.133.400	1.315.501	1.225.442	2.551.009	1.972.309

Sumber : Bank Indonesia Cabang Pekanbaru, 2009

Pemberian kredit kepada usaha kecil diharapkan mampu meningkatkan produksi dan pendapatan para pengusaha kecil. Perkembangan KUK yang disalurkan sudah cukup memadai yaitu sebesar 52,96 persen dari total pinjaman. Sampai dengan Juni 2008 jumlah KUK yang disalurkan mencapai Rp 988.683 juta sebagian besar yaitu Rp 530.211 juta (53,63 persen) untuk konsumsi, sisanya Rp 372.234 juta (37,65 persen) untuk Modal Kerja, dan Rp 86.239 juta (8,72 persen) untuk investasi.

Tabel 3 : Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Sektor Ekonomi di Perbankan Bengkalis Tahun 2004-2008 (Juta Rupiah)

Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
Pertanian	35.535	40.700	40.350	24.875	47.369
Pertambangan	37	94	-	-	803
Perindustrian	19.422	21.698	20.390	22.203	25.044
Jasa-jasa	49.998	61.238	59.475	83.256	81.104
Konstruksi	13.350	8.110	21.944	41.411	45.948
Perdagangan, Hotel & Restoran	130.124	166.529	245.127	268.845	361.518
Angk & Komunikasi	15.148	14.767	11.979	9.572	5.204
Jasa Dunia Usaha	18.865	34.127	22.268	28.843	24.897
Jasa Sosial Masyarakat	2.635	4.234	3.284	3.430	5.055
Lain-lain	194.763	283.647	320.623	422.109	603.275
Jumlah	429.879	573.906	685.964	821.288	1.119.113

Sumber : Bank Indonesia Cabang Pekanbaru, 2009

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PEDESAAN

Kebutuhan Permodalan

Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utamanya adalah petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian. Masalah yang biasanya dihadapi adalah permasalahan klasik yaitu kurangnya ketersediaan modal. Kelangkaan modal bisa terjadinya siklus mata rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang sulit diputus.

Usaha mikro dan kecil merupakan unit usaha paling kecil dalam masyarakat di pedesaan sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Tidak heran jika kebanyakan dari mereka menggeluti pertanian, nelayan, pedagang, usaha makanan, dan industri kecil rumah tangga. Sekitar 62,3% masyarakat menyatakan modal usaha yang dimiliki tidak cukup. Usaha mikro dan kecil sebenarnya tidak butuh modal besar, tetap saja salah satu kendala klasik yang sering dihadapi di dalam menjalankan atau mengembangkan usaha adalah kurangnya modal atau dana usaha yang dimiliki. Meski peranannya besar dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, tapi keberadaannya belum tersentuh perbankan.

Tabel 4 : Kecukupan Modal Usaha Menurut Pekerjaan Masyarakat

No.	Sektor Pekerjaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	Jumlah
1.	Petani	13 (29,5%)	27 (61,4%)	4 (9,1%)	44
2.	Nelayan	2 (22,2%)	7 (77,8%)	0	9
3.	Pedagang	18 (40,9%)	25 (56,8%)	1 (2,3%)	44
4.	Pegawai/Guru/Pensiunan	2 (28,6%)	5 (71,4%)	0	7
5.	Industri	3 (30,0%)	7 (70,0%)	0	10
	Jumlah	38 (33,3%)	71 (62,3%)	5 (4,4%)	114

Sumber: Hasil Analisis Data Survey, 2009

Kegiatan nelayan yang mengikut musim dan memerlukan modal usaha yang relatif besar setiap kali

melaut, menyebabkan modal yang mereka miliki selalu tidak mencukupi. Hasil yang mereka peroleh dari melaut, sebagian besar habis digunakan saat mereka sedang tidak mencari ikan, sehingga saat diperlukan, modal tidak lagi mencukupi.

Masalah permodalan umumnya disebabkan karena keterbatasan akses ke sumber-sumber permodalan, terutama akses ke lembaga keuangan formal seperti bank, di samping keterbatasan pendidikan, pengetahuan atau kemampuan dalam mencukupi kebutuhan prosedur/persyaratan perbankan. Penyediaan modal usaha di dalam sektor pertanian yang sebagai sektor tradisional tidak begitu dominan, karena faktor lahan dan tenaga kerja masih menjadi faktor utama.

Sektor pekerjaan yang memiliki ketergantungan terhadap sumber permodalan adalah sektor industri. Usaha pembuatan bak, perabot rumah tangga dan industri batu bata sangat memerlukan modal di dalam kegiatan usahanya. Masyarakat di Kabupaten Bengkalis sangat mengharapkan terpenuhinya kebutuhan modal dalam waktu yang tepat, dengan persyaratan dan prosedur yang mudah serta dengan biaya murah. Lembaga keuangan apapun (*formal atau informal*) tidak menjadi masalah, asal dapat memenuhi harapan tersebut. Harapan ini tidak selalu dapat dipenuhi dengan baik sehingga selalu muncul permasalahan pembiayaan.

Di dalam menjalankan usahanya, sebagian besar masyarakat menggunakan sumber modal pribadi, baik dari tabungan yang telah dimiliki atau dengan menjual aset yang ada. Tengkulak hanya mampu beroperasi pada mereka yang bekerja sebagai petani, sedangkan untuk pekerjaan lainnya tidak satu responden pun yang berurusan dengan tengkulak untuk modal keperluan usahanya. Sekitar 29,5% petani telah menggunakan sumber modal dari pihak perbankan sebagai sumber modal keperluan usaha mereka, terutama mereka yang berusaha di pertanian tanaman perkebunan khususnya kelapa sawit.

Tabel 5 : Sumber Modal Untuk Keperluan Usaha Menurut Sektor Pekerjaan Masyarakat

No.	Sektor Pekerjaan	Pribadi	Tengkulak	Bank	Lain-lain	Jumlah
1.	Petani	30 (68,2%)	1 (2,3%)	13 (29,5%)	0	44
2.	Nelayan	8 (88,9%)	0	1 (11,1%)	0	9
3.	Pedagang	37 (84,1%)	0	6 (13,6%)	1 (2,3%)	44
4.	Pegawai/Guru/Pensiunan	6 (85,7%)	0	1 (14,3%)	0	7
5.	Industri	8 (80,0%)	0	1 (10,0%)	1 (10,0%)	10
Jumlah		89 (78,1%)	1 (0,9%)	22 (19,3%)	2 (1,8%)	114

Sumber: Hasil Analisis Data Survey, 2009

Hanya 11,1% nelayan yang memanfaatkan pinjaman dari pihak bank untuk membantu kegiatan usaha mereka. Selain sumber pribadi, tengkulak dan bank, ada pihak lain yang menjadi sumber modal usaha masyarakat, yaitu dari pihak perusahaan besar dan pemerintah. Responden yang berusaha di bidang industri dan perdagangan yang sudah memperoleh manfaat dari bantuan atau pinjaman modal dari perusahaan besar atau pemerintah.

Peran Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan

Lembaga keuangan mikro mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan pedesaan dan pengembangan usaha kecil mikro pedesaan. Hal ini terkait dengan fungsi lembaga keuangan mikro sebagai lembaga intermediasi keuangan. Gambaran kongkrit mengenai peran lembaga keuangan mikro

penting diketahui untuk mendukung perancangan dan pelaksanaan program lembaga keuangan mikro agar lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi pedesaan.

Harapan atau keinginan masyarakat desa di Kabupaten Bengkalis, fungsi dan peranan lembaga keuangan mikro adalah sebagai penyedia modal usaha. Selain sebagai penyedia modal usaha, sekitar 59,65% responden menyebutkan bahwa LKM dapat difungsikan sebagai lembaga penyedia jasa simpan pinjam, dan hanya sekitar 29,82% yang menyebutkan LKM sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat.

Dalam implementasinya LKM dianggap lebih efisien dari lembaga keuangan lain karena kedekatannya kepada masyarakat yang dilayani. Kedekatan ini akan mengurangi biaya-biaya transaksi. LKM dalam operasional juga memberikan fasilitas bantuan non keuangan. Misalnya bantuan untuk membuat rencana usaha, pencatatan dan pembukuan keuangan kelompok. Kelemahan LKM yang telah beroperasi di daerah lain adalah beroperasi tanpa dasar hukum.

Tabel 6 : Fungsi dan Peranan Lembaga Keuangan Mikro Menurut Sektor Pekerjaan Masyarakat

No.	Pekerjaan	Mengumpulkan Dana Masyarakat	Menyediakan Modal Usaha	jasa simpan pinjam
1.	Petani	10	28	26
2.	Nelayan	2	6	5
3.	Pedagang	17	34	28
4.	Pegawai/Guru/Pensiu nan	2	6	2
5.	Industri	3	7	7
Jumlah		34 29,82 %	81 71,05 %	68 59,65 %

Sumber : Hasil Analisis Data Survey, 2009

Peranan LKM menurut sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor industri, lebih penting sebagai penyedia modal jasa simpan pinjam, sedangkan sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat hanya sebagian kecil yang menyebutkan. Di satu sisi LKM memiliki keunggulan yang relatif tidak dimiliki oleh bank umum, yaitu: lokasinya yang dapat dijangkau nasabah pengusaha kecil dan mikro, memiliki fleksibilitas/keluwesannya dalam melakukan transaksi dengan nasabah yang oleh masyarakat dianggap tidak *bankable*, dan lebih memahami budaya masyarakat setempat karena keberadaannya secara psikologis/kekeluargaan antara pengelola LKM dengan anggotanya.

Namun di balik keunggulannya yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan, LKM masih menghadapi berbagai kendala sehingga tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Masih belum banyak masyarakat yang menginginkan LKM berfungsi sebagai pengumpul dana masyarakat, padahal LKM masih kesulitan mengakses dana bank atau sumber lainnya, baik untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat, maupun untuk menanggulangi kesulitan likuiditas.

Kelembagaan LKM

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa daerah sebagai telah menjadi alternatif

pembiayaan berbagai aktivitas masyarakat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Hasil kajian di Kabupaten Bengkalis juga menemukan kenyataan bahwa sebagian besar responden menyebutkan model kelembagaan yang mereka inginkan untuk lembaga keuangan mikro pedesaan dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Model lainnya yang juga menjadi alternatif masyarakat Kabupaten Bengkalis adalah Lembaga Usaha Simpan Pinjam (USP), perbankan (BPR atau swamitra) dan Lembaga Kredit Desa.

Keberhasilan pembangunan ekonomi kerakyatan di pedesaan diukur dari seluruh masyarakat di wilayah pedesaan dalam meningkatkan usaha dan telah menggunakan jasa intermediasi LKM pedesaan. Dengan demikian penduduk yang menjadi nasabah, baik untuk menabung dan meminjam di LKM telah berperan serta dalam mewujudkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk BUM-Desa bertugas dan berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah dan terarah pada masyarakat pedesaan. Juga untuk menghindarkan masyarakat pedesaan dari perangkap rentenir yang marak beroperasi di pedesaan. Jika LKM BUM-Desa ini berjalan maka dengan sendirinya LKM telah menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan dengan menyediakan modal melalui sistem perkreditan yang diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi produktif.

Tabel 7 : Model Kelembagaan LKM Menurut Sektor Pekerjaan Masyarakat

No.	Sektor Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Bank/ BPR	21	18,40
2.	BUM Desa	49	43,00
3.	Non-Bank	1	0,90
4.	USP	26	22,80
5.	Kredit Desa	17	14,90
Total		114	100,00

Sumber : Hasil Analisis Data Survey, 2009

Kehadiran BUM-Desa dengan usaha simpan pinjamnya diharapkan mampu mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru, mengingat kelompok ini umumnya belum disentuh oleh lembaga keuangan bank. Pemisahan USP di dalam kegiatan BUM-Desa dimaksudkan untuk : a) mengembangkan pelayanan dan pendapatan anggota. b) meraih atau menangkap peluang permintaan (*demand*) produk simpan pinjam (simpanan dan kredit/pinjaman) maupun penawaran (*supply*) dana dari anggota dan masyarakat, termasuk dana pembinaan perkuatan dari pemerintah yang beredar di masyarakat. c) mengembangkan keuangan khususnya simpan pinjam yang kokoh dan mandiri.

Sistem Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro

Pembebasan suku bunga bisa merugikan akses masyarakat miskin terhadap jasa keuangan. Biayanya lebih besar jika memberikan banyak pinjaman kecil daripada memberikan beberapa pinjaman besar. Kecuali LKM dapat membebaskan suku bunga jauh di atas rata-rata suku bunga pinjaman bank, mereka tidak akan mampu menutupi biaya mereka, dan pertumbuhan serta kesinambungan mereka akan terbatas karena pasokan pendanaan bersubsidi yang langka dan tak menentu. Ketika pemerintahan mengatur tingkat suku bunga, mereka biasanya menetapkannya pada tingkat yang terlampau rendah untuk memungkinkan LKM berkelanjutan. Pada saat yang sama, para penyalur LKM tak seharusnya meneruskan operasional yang tidak efisien kepada para pelanggan dalam bentuk harga (tingkat suku

bunga dan provisi lainnya) yang jauh lebih tinggi dari semestinya.

Sebagian besar masyarakat desa setuju adanya sistem pembebanan bunga bagi pembiayaan di lembaga keuangan mikro. Beban bunga menurut mereka harus dikenakan karena sumber permodalan bagi LKM bukanlah hibah, dan LKM masih harus membayar bunga dari masyarakat penabung. Bila masyarakat meminjam dana untuk modal bersumber dari lain-lain (bukan lembaga keuangan formal/bank), mereka akan terjebak pada *money lender* (rentenir). Kisaran bunga utang dari rentenir sangat tinggi. Namun demikian, banyak usaha kecil masyarakat di pedesaan hidup dan berjalan dengan sistem tersebut. Maka dengan sistem beban bunga yang tidak terlalu tinggi, diharapkan perkembangan usaha kecil dan mikro di pedesaan akan lebih laju perkembangannya.

Bagi usaha kecil di pedesaan, yang terpenting bukan hanya bunga pinjaman yang rendah, tetapi akses ke lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman tanpa agunan dan prosedurnya mudah serta dananya dapat dicairkan tepat waktu dan tepat jumlah. Pinjaman dana itu pada umumnya dibutuhkan untuk tambahan modal kerja. Masyarakat desa setuju dengan sistem agunan pada lembaga keuangan mikro pedesaan. Hasil analisis ini menguatkan hipotesis umum bahwa keengganan masyarakat berpartisipasi terhadap lembaga keuangan bukan karena besarnya tingkat bunga, akan tetapi pada kerumitan prosedur. Terhadap aspek bunga mayoritas menempatkannya dalam pertimbangan yang ke dua setelah sanksi. Sementara itu terhadap agunan, mayoritas nasabah hampir tidak mempertimbangkan atau menjadi pertimbangan akhir. Hal ini sejalan dengan kebijakan skim perkreditan LKM yang tidak memprioritaskan adanya penjaminan. Solusi penjaminan bagi nasabah LKM adalah garansi kelompok masyarakat atau kepala desa. Makna pendekatan kelompok dalam konteks LKM adalah sebagai penjaminan, kompensasi dari tidak adanya agunan (*collateral*). Oleh karena itu pendekatan kelompok menjadi krusial untuk mendukung keberlanjutan LKM.

Akses masyarakat pedesaan untuk mendapatkan pinjaman dana bagi modal tambahan sangat tinggi, karena persyaratannya relatif tidak berat dan tanpa agunan. Prosedur pengajuan pinjaman relatif sederhana, sehingga memudahkan calon nasabah untuk mengakses pinjaman ke LKM. Karena tidak dipersyaratkan adanya agunan, sebagai gantinya LKM mensyaratkan calon nasabah masuk anggota kelompok. Artinya bagi calon nasabah yang di luar anggota tidak memiliki peluang memperoleh layanan LKM.

Masyarakat desa juga menerima adanya biaya administrasi di dalam pengurusan pinjaman di LKM. Persoalan penetapan biaya administrasi ini merupakan salah satu isu penting dalam praktek lembaga keuangan mikro. Seringkali biaya administrasi ini diasosiasikan sebagai “pintu belakang” beban penambah bunga. Karena itu, agar biaya administrasi ini tidak masuk dalam kategori “tambahan” yang tidak diperbolehkan, maka ada dua syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan. Kedua, prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut. Kalau kebijakan LKM berprinsip “yang penting biaya administrasinya 1 persen dari pembiayaan”, tanpa terkait dengan nilai riil administrasi yang dilakukan, maka hal tersebut masuk dalam kategori bunga tambahan.

Alternatif yang mungkin digunakan supaya LKM dapat memetik keuntungan, sekaligus menutupi biaya operasionalnya, adalah melalui penerapan akad-akad bisnis secara tepat. Dalam setiap akad, akan selalu ada unsur yang memberikan peluang keuntungan bagi lembaga keuangan mikro. Sebagai contoh,

unsur rasio bagi hasil dalam pembiayaan kredit modal kerja, serta marjin profit pada pembiayaan investasi. Namun demikian, yang namanya bisnis, juga harus tetap diantisipasi kemungkinan rugi, karena untung rugi merupakan bagian tujuan pendirian LKM.

Sisitem sanksi (*punishment*) perlu dijalankan karena selama ini program-program bantuan yang dijalankan tidak pernah terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Sebagian besar masyarakat setuju diberlakukan sanksi, karena sumber pendanaan di LKM tidak sepenuhnya hibah atau pun program dari pemerintah. Pola dana bergulir sebenarnya merupakan konsepsi asli (*genuine*) dari lembaga keuangan mikro di pedesaan. Dipadukan dengan pola tanggung renteng, pola ini telah menjadi pola yang umum dilakukan oleh lembaga keuangan mikro di seluruh Indonesia. Konsepsi dana bergulir, bagaimanapun bentuk implementasinya, membutuhkan institusi dalam pengelolaannya. Hal tersebut berkaitan dengan “*punishment and reward*” yang harus ada dalam pelaksanaan pola dana bergulir tersebut. Kalau dana bergulir tersebut dilaksanakan antar nasabah, maka pengelolaannya dilakukan oleh LKM. Kalau pola dana bergulir ini dilaksanakan antar LKM, tentunya harus ada sebuah institusi yang dapat mengawasi pelaksanaan aturan main pola dana bergulir tersebut, sekaligus dapat menerapkan “*punishment and reward*” kepada pesertanya.

PENUTUP

Usaha mikro kecil pedesaan memiliki modal usaha yang tidak mencukupi. Sektor pekerjaan yang memiliki ketergantungan terhadap sumber permodalan adalah sektor industri. Di dalam menjalankan usahanya, sebagian besar usaha mikro kecil menggunakan sumber modal pribadi, baik dari tabungan yang telah dimiliki atau dengan menjual aset yang ada.

Fungsi dan peranan utama lembaga keuangan mikro adalah sebagai penyedia modal usaha, hanya sedikit masyarakat yang menginginkannya sebagai pengumpul dana masyarakat. Model kelembagaan yang mereka inginkan untuk lembaga keuangan mikro dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Model lainnya yang juga menjadi alternatif usaha kecil mikro pedesaan di Kabupaten Bengkalis adalah Lembaga Usaha Simpan Pinjam (USP), perbankan (BPR atau swamitra) dan Lembaga Kredit Desa

Sebagian besar usaha mikro kecil pedesaan setuju adanya sistem pembebanan bunga bagi pembiayaan. Terhadap aspek bunga mayoritas menempatkannya dalam pertimbangan yang ke dua setelah sanksi (*punishment*). Masyarakat desa juga menerima adanya sistem agunan dan biaya administrasi di dalam pengurusan pinjaman di lembaga keuangan mikro pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 2009. *Kajian Ekonomi Regional*, Bank Indonesia Cabang Pekanbaru
- Bappeda Kabupaten Bengkalis, 2009. *Laporan Tahunan Sosial Ekonomi Kabupaten Bengkalis*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- Diana, 2003. Lembaga Keuangan Mikro Dalam Wacana & Fakta: Perlukah Pengaturan. Editorial *Jurnal Analisis Sosial*. Diakses dari <http://www.akatiga.or.id/d-lembaga-keu/editorial-Ind.htm>
- Heimann, W., S. Jansen, dan IK Budisastra, 2005. *Rural Micro Finance in NTB – Concept and Implementation Strategy, Executive Summary*, Bank Indonesia (BI), ProFI (*Promotion of Small Financial Institutions*) & GTZ (*German Technical Cooperation*).
- Ismawan, B., dan S. Budiantoro, 2005. Mapping Microfinance in Indonesia, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Edisi Maret.

- Perform, 2003. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa/Kelurahan Dalam Bentuk BUMDes, Materi Pelatihan Pengelolaan Keuangan BUMDes*, Perform Project _USAID.
- Wijono, W.W., 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Edisi Khusus, hal: 86-100.